

BANTUAN MILITER OLEH JERMAN KEPADA KURDI PESHMERGA DALAM PERANG MELAWAN ISIS DI IRAQ PADA TAHUN 2014

ABSTRACT

Germany had long been involved in international peace and security enforcement, including the fought against terrorism. In response to global terrorism measures, the German government had actively participated in supporting US-led counter-terrorism efforts to provide military assistance. The German government had also agreed to send troops in support of US-led global counter-terrorism operations. However, in September 2014, the German government made the controversial decision not to participate in air strikes conducted by the US-led coalition that hit the Islamic state of Iraq and Syria in Iraq but chose to provide weapons and military training to the Kurdish Peshmerga guerrillas in Iraq. In this study, the authors used the national role concept described by Holsti. Then the authors found an interesting fact that military aid by Germany to the Kurdish Peshmergas in the fight against ISIS in Iraq in 2014, aim to improve strategic success which include success in terms of military, political, economic and diplomatic relations. This search was interesting because the Germans preferred to send weapons and aid military training to Kurdish Peshmerga fighters in Iraq than join the US air strikes to crack down on ISIS in Iraq. In addition, German policy had been controversial because of the actions Germany sends weapons to the Kurdish Peshmergas in Iraq was the first time that Germany sends weapons to conflict zones to parties outside NATO member countries and member of Axis. This research were explicit and explained the cause of the implementation of Germany foreign policy who send weapons and military training to the Kurds Peshmerga in Iraq.

Key Words: German, Military Assistance, Foreign Policy, Kurdish Peshmerga, War Against ISIS

ABSTRAK

Jerman sudah lama terlibat kedalam penegakan keamanan dan perdamaian global termasuk melawan terorisme. Dalam merespon tindakan terorisme global, Pemerintah Jerman turut aktif dengan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat bahkan dengan menyediakan bantuan militer. Pemerintah Jerman juga menyetujui untuk mengirimkan pasukannya sebagai dukungan bagi operasi-operasi pemberantasan terorisme global yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, pada bulan September tahun 2014, pemerintah Jerman justru mengambil keputusan kontroversial dengan tidak berpartisipasi dalam serangan udara yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat yang menggempur *Islamic State of Iraq and Syria* di Irak namun memilih menyediakan persenjataan dan pelatihan militer terhadap para pejuang Kurdi Peshmerga di Irak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *National Role* yang dijelaskan oleh Holsti. Kemudian penulis menemukan fakta menarik bahwa bantuan militer oleh Jerman pada Kurdi Peshmerga dalam perang melawan ISIS di Irak tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan strategis yang meliputi keberhasilan dalam segi militer, politik, ekonomi, dan diplomasi. Penelitian ini menjadi menarik karena Jerman lebih memilih untuk mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada para pejuang Kurdi Peshmerga di Irak daripada ikut dalam serangan udara yang direncanakan oleh Amerika Serikat untuk menumpas ISIS yang berada di Irak. Selain itu, kebijakan Jerman ini menjadi

kontroversial karena tindakan Jerman mengirimkan persenjataan kepada Kurdi Peshmerga di Irak merupakan pertama kalinya Jerman mengirimkan persenjataan ke wilayah konflik kepada pihak diluar negara anggota NATO dan negara-negara sekutu. Penelitian ini bersifat eksplanatif dan menjelaskan mengenai penyebab dilaksanakannya kebijakan luar negeri Jerman yang mengirimkan persenjataan dan latihan militer kepada Kurdi Pashmegra di Irak.

Kata-kata kunci : Jerman, Bantuan Militer, Kebijakan Luar Negeri, Kurdi Peshmerga, Perang Melawan ISIS

Jerman sudah lama terlibat kedalam penegakan keamanan dan perdamaian global termasuk melawan terorisme. Dalam merespon tindakan terorisme global, Pemerintah Jerman turut aktif dengan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat bahkan dengan menyediakan bantuan militer. Pemerintah Jerman juga menyetujui untuk mengirimkan pasukannya sebagai dukungan bagi operasi-operasi pemberantasan terorisme global yang dipimpin Amerika Serikat. Namun pada bulan September tahun 2014, pemerintah Jerman justru mengambil keputusan kontroversial dengan tidak berpartisipasi dalam serangan udara yang dilakukan koalisi militer pimpinan Amerika Serikat dan Perancis yang menggempur *Islamic State of Iraq and Syria* di Irak namun memilih menyediakan persenjataan dan melakukan pelatihan militer terhadap para pejuang Kurdi Peshmerga di Irak. Keputusan Jerman untuk mengambil bagian dalam perang melawan ISIS disampaikan dalam pernyataan Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen kepada surat kabar Bild, “We must defeat this terror militia by military means” (Pohle, 2014). Menurut Spiegel Online, beberapa lusin tentara akan memulai pelatihan pada Kurdi Peshmerga di Erbil pada awal tahun depan. Program pelatihan yang direncanakan akan dikoordinasikan dengan aliansi internasional melawan ISIS, dan pengiriman persenjataan oleh Jerman akan dimulai pada bulan Agustus 2014 (Spiegel, tt). Strategi yang diterapkan di Irak seperti strategi lain yang pernah diterapkan di Afghanistan, Somalia, dan Mali yang berfokus memberikan pelatihan kepada pasukan lokal sehingga mereka dapat menjaga keamanan mereka sendiri. Strategi ini juga diterapkan setelah adanya pernyataan dari pemimpin Jerman pada akhir tahun 2016 yang menyatakan bahwa Republik Federal Jerman harus mengambil tanggungjawab yang lebih besar, baik secara diplomatis maupun militer didalam krisis internasional (Pohle, 2014).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jerman berubah menjadi salah satu negara sekutu, anggota dari NATO dan juga komunitas negara Eropa Barat. Jerman sebagai salah satu anggota, juga mulai terlibat dalam misi-misi kemanusiaan serta pada awal 1990an turut terlibat dalam *peacekeeping missions*. Jerman secara mandiri meredefinisikan posisinya hingga sekarang menjadi salah satu pelaku utama dalam penjaga perdamaian di dunia internasional. Hal ini merestrukturisasi Jerman sebagai negara yang dulunya *consumer of security* kemudian menjadi *producer of security* (Neubeck, 2007:44). Dengan perubahan drastis yang diambil oleh Jerman dalam perannya di arena politik internasional, menyebabkan semakin tingginya tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian global.

Isu terorisme semakin mendapatkan perhatian pemerintah Jerman, terutama dipicu oleh peristiwa serangan 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Meskipun serangan tersebut tidak ditujukan langsung kepada wilayah kedaulatan Jerman, namun peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi Jerman untuk mengubah kebijakan serta cara pikir mereka tentang konter-terorisme (Transnational Terrorism Security & The Rule of Law, 2008). Dalam merespon peristiwa serangan 11 September 2001, pemerintah Jerman mengadopsi dua paket kebijakan utama anti-teroris. Yang pertama, disahkan pada November 2001 yang menargetkan menutup celah dalam peraturan hukum di Jerman sehingga mempersempit ruang bagi para teroris untuk tinggal dan menghimpun dana di Jerman. perubahan signifikan ini termasuk : (1) Imunitas kelompok keagamaan dan badan amal dari investigasi atau pengawasan oleh pihak berwenang dicabut, begitu juga hak istimewa mereka di bawah *right of assembly* yang memberikan peluang yang semakin besar kepada pemerintah untuk bertindak melawan kelompok ekstrimis; (2) Pelaku teroris sekarang dapat diadili di Jerman, bahkan jika mereka merupakan anggota organisasi teroris yang melakukan aksi hanya di luar negeri; (3) Kemampuan teroris untuk masuk dan tinggal di Jerman semakin dibatasi; (4) Keamanan lalu lintas di wilayah perbatasan darat dan udara Jerman semakin diperkuat (Miko T. Francis & Froehlich Cristian, 2004). Paket kebijakan yang kedua, ditujukan untuk

meningkatkan efektifitas dan komunikasi dari badan intelijen dan penegak hukum di dalam level federal dan state.

Kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang dipimpin oleh Abu Bakar al Baghdadi pada tahun 2013 menimbulkan berbagai respon dari dunia internasional termasuk bagi Jerman sendiri. Dalam merespon perkembangan ISIS, Amerika Serikat membentuk koalisi terbuka untuk melakukan perlawanan. Pada 5 September 2014, koalisi anti-ISIS terbentuk dan berisikan 9 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Uni Emirat Arab, Qatar, Australia, Belanda dan Kanada (CNN, 2017). Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat ini menekankan penggunaan *Air Power* untuk menekan dan mengalahkan ISIS. Hal ini diketahui dari pernyataan Obama, “Air strikes were a necessary counter-terrorism measure to prevent the group, also known as ISIL, from becoming a future threat to the US.” (Cooper, 2014) Obama menambahkan, “...the effort would rely on American airstrikes against its leaders and positions...”. Menggambarkan signifikansi serangan udara dalam mengalahkan ISIS. Setelah koalisi terbentuk, sebagian besar negara koalisi sepakat untuk mengerahkan *air power* mereka untuk melawan ISIS.

Satu dari dua negara pada awal terbentuknya koalisi global melawan ISIS selain Italia yang tidak mengirimkan *Air Power* untuk melawan ISIS adalah Jerman. Pemerintah Jerman mengumumkan bahwa pihaknya hanya akan mengirimkan persenjataan serta sedikit pasukan untuk mengadakan pelatihan militer bagi suku Kurdi di Pasmegra, Irak. Kurdi merupakan salah satu dari penduduk asli Timur Tengah dan juga merupakan kelompok etnis terbesar keempat di kawasan Timur Tengah. Bangsa Kurdi mendiami daerah pegunungan yang sekarang dikenal sebagai daerah Iran, Irak, Syria, dan Turki.

Pengiriman senjata dan amunisi oleh Jerman kepada Pasukan Kurdi Permesgra bernilai 70 juta euro atau sekitar 91 juta US dollar. Persenjataan dan pasukan ini nantinya akan dikirimkan kepada pasukan Kurdi yang berada di Irak bagian utara dalam tiga gelombang (Wallace, 2014). Menurut pemerintah Jerman yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen dan Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier, pengiriman persenjataan tersebut akan cukup untuk digunakan oleh 4000 orang brigade tentara. Dia menambahkan bahwa, pelatihan akan diselenggarakan di Erbil, ibu kota wilayah Kurdi Irak atau bisa diselenggarakan di negara ketiga. Tindakan Jerman dalam melawan ISIS sangat berbeda jika dibandingkan dengan peran Jerman selama *war on terrorism* yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Sejak tahun 2001 Jerman telah aktif mengirimkan pasukan, senjata, pesawat dan peralatan perang lainnya untuk melawan terorisme.

Perang / Peperangan

Jhon Kekes (2010) dalam pandangannya berjudul “War” yang diterbitkan *Royal Institute of Philosophy* berpendapat bahwa:

“war is organized violence by voluntary, conscripted, or mercenary armed forces; planned by leaders of a nation or a group; involves the use of weapons; aimed at an enemy; and may be offensive or defensive. In the narrow sense, war is waged by the armed forces of one nation against the armed forces of another nation. In the wide sense, war may also be waged by clandestine resistance fighter, guerillas, partisans, terrorists, crime syndicates, warlords and their followers; it may be civil, religious, ethnic, or tribal; it may take the form of terrorism, genocide, and massacres; it may be waged by armed forces against a group of fellow citizens or against some transnational group; the enemy aimed at may or may not be armed or organized and may or may not include civilians; and

violence involves killing, disabling, and generally subduing the enemy.”(Kekes, 2010)

Pendapat Kekes tentang War ini digunakan untuk menjelaskan tentang perang melawan ISIS yang terjadi di Irak. Meliputi bagaimana perang berlangsung, apa yang melandasi (tujuan perang), serta terkait strategi yang digunakan dalam menghadapi musuh di medan perang.

Konsepsi National Roles

Dalam bukunya yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of foreign Policy*, Holsti menjelaskan national roles sebagai kemungkinan variabel kausal pada operasi didalam sistem internasional, atau penjelasan mengenai kebijakan luar negeri dari individu suatu negara. Menurut Holsti, terdapat empat konsep yang akan membantu peneliti yang akan menganalisis kebijakan luar negeri. Konsep tersebut yaitu: (1) role performance yang mencakup sikap, keputusan, dan tindakan yang diambil pemerintah. (2) konsepsi peran nasional sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh mereka sendiri. (3) the role prescriptions yang muncul, di dalam berbagai keadaan, baik dari lingkungan alter atau eksternal. (4) a position, yaitu tempat terjadinya action dari buah negara yang berada dalam sebuah sistem preskripsi peran (Holsti, 1970).

Konsepsi national role juga terkait dengan atau dengan kata lain ditopang oleh preskripsi peran yang berasal dari lingkungan eksternal. Sumber dari preskripsi peran ini mencakup beberapa hal seperti (1) struktur dari sistem internasional meliputi nilai keseluruhan dari sistem internasional, prinsip-prinsip hukum umum dalam suatu sistem yang seolah-olah memberikan perintah untuk mendapatkan dukungan universal dari para anggotanya (seperti doktrin tentang persamaan negara yang berdaulat); (2) peraturan, tradisi, dan harapan negara seperti yang diungkapkan dalam piagam suatu organisasi internasional dan regional, bagaimana opini dunia, serta perjanjian multilateral dan bilateral; (3) komitmen yang kurang formal atau komitmen secara implisit yang berlandaskan kepada prinsip saling memahami (Holsti, 1970).

Konsep Keberhasilan Strategis dalam Perang

Seorang duta besar sekaligus pengamat U.S diplomatic and military strategy in the middle east di Washington Institute, James F. Jeffrey (2014) mengatakan bahwa “The core purpose of the military is not to win wars but to win at the tactical and operational levels against opposing forces” (Jeffrey, 2014). Hal ini menjelaskan bahwa dalam suatu peperangan (Menurut Jeffrey) tujuan utama perang bukan hanya untuk memenangkan pertarungan melawan pasukan musuh, melainkan arah dan tujuan peperangan dilakukan. Seperti yang telah di sampaikan oleh Clausewitz, bahwa strategi yang sukses bukan hanya terlihat dari kesuksesan di medan perang dan kejeniusan komandan, tapi juga penilaian penguasa politik dalam menentukan tujuan perang yang konsisten dengan tujuan politik dan sarana militer, ekonomi dan diplomatik yang ada. Pentingnya menentukan keberhasilan strategis tersebut terutama terjadi dalam kondisi limited war of choice dan menghadapi kondisi konflik internal yang koheren (Jeffrey, 2014). Hal tersebut sering dikutip dari aksioma Clausewitz bahwa "perang dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan negara dengan cara lain" hal ini diperkuat oleh pernyataannya bahwa unsur terakhir dalam kemenangan adalah “penolakan musuh terhadap apa yang menjadi tujuan/perhatiannya” (O’Connor, 1969).

Peran Penduduk Lokal dalam Perang

Dalam menghadapi perang terutama jika perang tersebut merupakan melibatkan negara melawan aktor non-negara (teroris), keterlibatan unsur-unsur domestik perlu untuk dipertimbangkan. Memaksimalkan *local communities* dapat secara signifikan meningkatkan prospek dari counterinsurgency (teroris). Dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama memobilisasi penduduk lokal untuk melawan teroris, dapat menyediakan informasi mengenai lokasi dan pergerakan mereka sehingga dapat menghambat timbulnya tempat berlindung bagi teroris di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan suku dan komunitas dan membentuk resistensi pada level akar rumput, maka pasukan pertahanan lokal dapat membantu memobilisasi masyarakat secara bersamaan di berbagai daerah (Jones, tt). Untuk mengoptimalkan efektifitas dalam counterterrorism/counterinsurgency, maka dibutuhkan kombinasi usaha *top-down* antara pemerintah pusat dan usaha *bottom-up* dari komunitas lokal. Pentingnya kombinasi tersebut karena kekuasaan di daerah-daerah pedesaan dan terpencil cenderung bersifat lokal, dan individu-individu umumnya mengidentifikasi diri mereka dengan suku, sub-suku, klan, komunitas, maupun qawn. Qawn merupakan unit identifikasi dan solidaritas yang dapat terbentuk atas dasar kekeluargaan, tempat tinggal, atau pekerjaan.

Keberhasilan strategis ditinjau dari sisi militer

Menjelang perang melawan militan ISIS, pasukan Kurdi Peshmerga telah dikenal sebagai pasukan gerilya yang tangguh. Predikat ini mengejutkan karena pada awal-awal konfrontasi Peshmerga berhadapan dengan para militan ISIS justru berakhir dengan kekalahan. Akibat dari kekalahan ini, membuat para media dengan cepat melaporkan bahwa kekalahan Kurdi Peshmerga ini muncul akibat adanya perbedaan kemampuan senjata (Sidney, 2016).

Dengan adanya bantuan dari Jerman yang mengirimkan pelatihan militer serta persenjataan untuk para pejuang Kurdi di Irak serta dengan adanya dukungan air strike pimpinan Amerika Serikat, para pejuang Kurdi di Irak mendapatkan harapan baru karena berhasil mendapatkan beberapa kemenangan melawan para pasukan ISIS di beberapa wilayah. Pasukan kurdi dengan bantuan dari airpower Amerika Serikat dan para anggota koalisi, berhasil merebut kembali wilayah Mahmoor dan Gweyr dari pengaruh ISIS (Ostovar, 2015). Beberapa waktu kemudian, pasukan Irak dibantu oleh pasukan Kurdi dan airpower dari koalisi berhasil merebut Mosul Dam dan Haditha Dam (Coren et al. 2014). Dam yang berada di kota Mosul Irak ini merupakan Dam yang strategis. Pentingnya Dam Mosul ini bagi wilayah Mosul dan sekitarnya tecermin dari studi yang dilakukan oleh para insinyur menunjukkan bahwa kegagalan Dam dalam beroperasi atau kehancuran Dam bisa berdampak bencana yaitu terjadinya banjir yang melanda keseluruhan penjuru Baghdad karena Dam Mosul ini merupakan fasilitas hidroelektrik terbesar di Irak yang menampung aliran sungai Tigris. Pertempuran sengit juga terjadi ada bulan Maret 2015. Gerilyawan ISIS yang sudah terkepung kemudian berusaha menggunakan terowongan untuk menghindari pasukan Irak dan Kurdi yang mengepung mereka dan kemudian mengincar akses ke Jalan Raya. Perlu diketahui bahwa jalan raya merupakan rute pasokan kritis ke Mosul, yaitu basis utama gerilyawan ISIS yang berada di Irak (Coren et al. 2015). Keberhasilan ini juga berimbas pada kehilangan ISIS atas kota Tikris pada bulan April 2015.

Setelah itu pada bulan November 2015, para pejuang Kurdi dan Yazidi yang didukung oleh kekuatan udara aliansi global, mulai melakukan serangan besar untuk merebut kembali wilayah Sinjar di Irak. Upaya merebut kembali wilayah Sinjar ini penting karena dapat memotong rute pasokan ISIS yang penting antara Raqqa, Suriah, yaitu ibukota kelompok gerilyawan ISIS serta wilayah Mosul yang menjadi kota terbesar yang dikuasai kelompok ISIS di Irak (Sands, 2016). Keberhasilan dalam merebut wilayah ini menyiratkan bahwa ISIS

telah kehilangan momentum ofensif, gagasan tersebut diperkuat dengan direbutnya wilayah Sinjar dari ISIS oleh pasukan Kurdi. Pada awal bulan November 2015, momentum berlanjut dari ISIS saat tentara Irak merebut kembali kompleks pemerintah di Ramadi tengah. Selain kemenangan tentara reguler setempat, milisi Syiah juga telah menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk melawan ISIS (Sands, 2016).

Dengan demikian, bantuan militer berupa pengiriman persenjataan dan pelatihan militer yang diberikan oleh Jerman kepada pasukan Kurdi Peshmerga di Irak dapat membantu meningkatkan keberhasilan strategis dari sisi militer. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Peshmerga yang pada awal konfrontasi melawan militan ISIS mengalami beberapa kekalahan, namun setelah mendapatkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer oleh Jerman dan bantuan dari koalisi global maka pasukan Kurdi Peshmerga dapat mengimbangi bahkan membalik keadaan dengan memperoleh beberapa kemenangan dalam konfrontasinya melawan militan ISIS di Irak. Kemenangan yang dicapai oleh pasukan Kurdi Peshmerga dibantu oleh pasukan Irak dan koalisi global ini, melengkapi fakta yang disampaikan oleh angkatan bersenjata Irak bahwa ISIS hampir kehilangan seluruh wilayah yang dikuasainya sejak tahun 2014 di Irak dan Suriah. Militan ISIS menguasai sekitar 40% dari wilayah yang berada di Irak, namun kini ISIS hanya menguasai kurang dari tujuh persen atau tepatnya 6,8 persen wilayah yang berada di Irak, hal ini disampaikan oleh juru bicara komando operasi gabungan Brigadir Jenderal Yahya Rasool pada Selasa 11 April 2017 (Kompas, 2017).

Fokus utama dari peperangan konvensional adalah kehancuran lawan. Kerangka ini bisa di terjemahkan kedalam pendekatan “kill-capture” untuk memperoleh kemenangan karena dalam pertempuran yang spesifik, kehancuran lawan didefinisikan dengan membunuh atau menangkap kekuatan pasukan lawan hingga lawan tersebut musnah atau menyerah (Gat, 1989). Kemenangan perang dalam pandangan militer juga berkaitan dengan penguasaan teritori. Seperti pendapat yang diungkapkan teoritis asal Swiss Antoine-Henri Jomini, dia mengatakan bahwa kontribusi dari strategi militer berhubungan dengan penaklukan teritorial dan kemenangan. Dia mengatakan “the destruction of the enemy’s field armies was the new military aim” (Gat, 1989). Penulis meminjam pendapat dari Jomini untuk menjelaskan tentang kemenangan perang secara militer. Kemenangan perang ditentukan oleh kehancuran lawan dan berkaitan juga dengan penaklukan teritori, pandangan ini menurut penulis sesuai dengan pencapaian yang diperoleh oleh pasukan Kurdi Peshmerga dalam konfrontasi melawan militan ISIS di Irak. Penulis setuju bahwa kemenangan-kemenangan yang telah diperoleh pasukan Kurdi Peshmerga dengan merebut kembali beberapa wilayah di Irak dan menumpas militan ISIS yang menaungi wilayah-wilayah tersebut merupakan suatu wujud keberhasilan dalam peperangan.

Keberhasilan strategis ditinjau dari sisi politik

Dalam “White Paper on Germany security policy and the future of the Bundeswehr”, dijelaskan bahwa Jerman harus mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanan internasional, dan bahwa Jerman karenanya harus meningkatkan peran militernya di panggung dunia. Jerman telah menjadi lebih aktif secara militer, dengan mulai untuk membelanjakan lebih banyak anggaran pada pertahanan, dan bekerja sama lebih erat dengan sekutu (Federal Ministry of Defence, 2006). Menurut penulis, tindakan Jerman dengan mengirimkan bantuan militer ini selaras dengan tujuan Jerman yang tercantum pada White Paper Jerman yaitu mempertahankan sistem tatanan global yang ada saat ini, dengan membantu mempertahankan tata kelola global dan mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam hal keamanan global.

Jerman tergabung kedalam suatu struktur sistem internasional yaitu NATO dan EU yang memiliki prinsip-prinsip dan hukum yang mengatur didalamnya. Dengan tergabungnya Jerman dalam struktur internasional tersebut, maka ketika koalisi global melawan ISIS dibentuk, Jerman memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi kedalam koalisi tersebut. Namun ketika di sisi lain Jerman dihadapkan dengan nilai dan prinsip yang dianut negaranya serta adanya perdebatan dalam internal Jerman tentang keterlibatan pasukan Jerman dalam wilayah konflik, Jerman berusaha tetap menjalankan national role nya yang ingin mengambil kontribusi dalam keamanan global dengan tetap mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer sebagai wujud kontribusinya. Dengan demikian, menurut penulis apa yang tercantum didalam White Paper Jerman ini selaras dengan national role Jerman dalam kasus perang melawan militan ISIS di Irak.

Perang merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan politis dan pelaksanaannya hanya bisa ditentukan dan berdasarkan pada keputusan politis pemimpin negara, bukan komandan militer. Dalam suatu peperangan tujuan utama bukan hanya untuk memenangkan perang melawan pasukan musuh, namun juga arah dan tujuan peperangan yang ditentukan oleh penguasa politik dan diterjemahkan kedalam level taktik dan operasional. Seperti yang telah di sampaikan oleh Clausewitz, bahwa strategi yang sukses bukan hanya fungsi dari kesuksesan medan perang dan kejeniusan komandan, tapi juga penilaian penguasa politik dalam menentukan tujuan perang yang konsisten dengan tujuan politik dan sarana militer, ekonomi dan diplomatik yang ada.

Dari uraian diatas, penulis juga setuju dengan pendapat Clausewitz bahwa Perang merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan politis dan pelaksanaannya hanya bisa ditentukan dan berdasarkan pada keputusan politis pemimpin negara, bukan komandan militer. Dalam kasus perang melawan ISIS di Irak, tindakan Jerman dengan mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada pasukan Kurdi Peshmerga di Irak merupakan upaya Jerman dalam mencapai tujuan politisnya yaitu mengambil peran yang lebih besar di dalam penegakan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada pasukan Kurdi Peshmerga di Irak, maka Jerman secara otomatis telah mencapai tujuan politisnya yaitu memenuhi kewajibannya terhadap koalisi global yang dibentuk untuk melawan ISIS.

Keberhasilan Strategis dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan Jerman memberikan bantuan militer kepada Peshmerga Irak 2014 memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jerman, terutama bagi industri perlengkapan senjata. Pada tahun 2014, industri senjata Jerman menghadapi tantangan dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, Bundeswehr Jerman dan Kementerian Pertahanan berencana untuk mengurangi pasokan senjata, dan negara-negara NATO dan Uni Eropa, mayoritas pemakai senjata dan peralatan perang produksi Jerman, mengurangi anggaran belanja untuk pertahanan akibat krisis ekonomi Eropa yang belum membaik (Gotkowska, 2014).

Di Jerman, industri persenjataan merupakan bagian dari industri keamanan dan pertahanan. Termasuk di dalamnya mencakup perusahaan yang memproduksi untuk kebutuhan keamanan sipil dan pertahanan nasional. Industri persenjataan Jerman merupakan sebuah *industrial complex*, melibatkan beragam industri penyusun (Gotkowska, 2014). Beragam perusahaan menyokong industri ini, mulai dari kecil, menengah hingga skala besar, menjadikan industri senjata sangat penting bagi Jerman.

Menurut *Federation of German Security and Defence Industries* (BDSV) (Gotkowska, 2014), pada tahun 2011 perusahaan di sektor ini secara langsung mempekerjakan 100 ribu orang dan menghasilkan 120 ribu pekerjaan subkontrak lainnya. Output mereka di tahun 2011 bernilai

21,3 miliar euro. Antara tahun 2005 dan 2011, nilai produksi industri yang didefinisikan secara luas tumbuh sebesar 6% - dibandingkan dengan pertumbuhan 0,8% di sektor senjata yang didefinisikan secara sempit. Demikian pula, angka pekerjaan untuk periode yang sama menunjukkan peningkatan 5,3% untuk keseluruhan industri, sementara sektor senjata yang didefinisikan secara sempit mencatat penurunan 0,4% dalam pekerjaan. Perlu dicatat bahwa BDSV telah meletakkan penekanan pada tingkat inovasi di atas rata-rata di antara perusahaan-perusahaan (dibandingkan dengan industri lain di Jerman). Dengan demikian, industri senjata memiliki peran penting bagi warga Jerman dan perekonomian pada umumnya.

Pemberian bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada Peshmegera, bisa jadi merupakan salah satu 'Exit Strategy' yang dilakukan Jerman untuk menjaga keberlangsungan *industrial complex* dari industri-industri senjata mereka. Mengingat kebutuhan senjata dan peralatan pendukung lain dibutuhkan dalam jumlah besar saat perang berlangsung. Akibatnya, industri persenjataan mereka dapat keluar dari krisis.

Keberhasilan Strategis dalam bidang Diplomasi

Hubungan diplomatik antara Jerman dan Irak sebenarnya telah dimulai sejak lama yakni ketika Jerman timur dan Jerman barat masih belum bersatu. Irak adalah negara non-komunis pertama yang mengakui keberadaan GDR (*East Germany*) pada tanggal 2 Mei 1969. Sebelumnya, pada tanggal 20-31 Maret 1969, sebagai bagian dari kunjungan Irak ke Uni Soviet dan Jerman Timur, kedua negara terlibat perbincangan untuk lebih memperdalam kerjasama dibidang ekonomi, politik, dan budaya. Namun setelah tahun tersebut, sangat sulit untuk menemukan data tentang relasi Irak dan Jerman, jika tidak hubungan yang terjadi sangat terbatas (Federal Foreign Office, 2017), pun saat itu adalah masa – masa krisis di Irak. Jerman memperbaiki kembali hubungan diplomatik dengan Irak pada tanggal 24 dan 28 Agustus 2004. Pada tanggal 24 Agustus, diakreditasi kedutaan Jerman di Baghdad dan pada tanggal 28, sebaliknya, Kedutaan Irak di Berlin. Selain itu, pada tahun 2009, Jerman juga telah memiliki Konsulat Jenderal di Erbil, yang merupakan pusat kota Pemerintahan Wilayah Kurdishtan yang dikenal dengan Kurdishtan Regional Government (KRG).

Sejak 2003, hubungan Jerman – Irak sudah semakin intensif khususnya terkait bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca krisis. Jerman menyediakan Irak sejumlah bantuan kemanusiaan dan sejak itu, membantu negara tersebut membangun kembali institusi ekonomi dan politiknya. Usaha yang dilakukan adalah menyediakan dukungan dalam membangun penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, pendidikan dan pelatihan, budaya dan reintegrasi pengungsi dan Internal Displacement People (IDP) melalui pembangunan ekonomi dan rekonstruksi. Jerman telah menyediakan bantuan kepada pemerintah Irak sejak 2003 yang nilainya sejumlah 400 juta Euro (setara 5,6 Triliun Rupiah). Diatas itu hal tersebut, hutang sejumlah 4,7 miliar Euro (setara 57 Triliun Rupiah) telah dibatalkan dibawah perjanjian Paris. Sejak periode krisis yang baru-baru ini terjadi, Pemerintah Federal telah menyediakan 593 juta Euro untuk bantuan, termasuk 207 juta Euro untuk bantuan kemanusiaan khususnya pengungsi dan IDP.

Pada Agustus 2014, Pemerintah Jerman sepakat menyediakan perlengkapan militer untuk Peshmegera dalam rangka perang melawan ISIS. Dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Irak, Federal Armed Forces Jerman melanjutkan partisipasi dalam misi pelatihan internasional untuk keamanan di wilayah Kurdistan. Bantuan perlengkapan dan pelatihan militer ini seolah menandai babak baru kedekatan hubungan Jerman dan Irak. Pemerintah Jerman menyediakan sekitar 713 juta euro sejak krisis ISIS dimulai tahun 2014. Bantuan

tersebut belum termasuk bantuan kemanusiaan yang diberikan Jerman kepada masyarakat Irak yang mengungsi akibat konflik yang nilainya mencapai 273 juta euro. Pada tanggal 31 Agustus 2014, Pemerintah Federal memutuskan, di samping bantuan dan dukungan yang telah diberikan, untuk juga menyediakan peralatan militer dan materi untuk mendukung Pemerintah Daerah Kurdistan dalam perjuangannya melawan organisasi teroris ISIS. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat Irak, Angkatan Bersenjata Federal terus berpartisipasi dalam misi pelatihan internasional untuk pasukan keamanan di wilayah Kurdistan Irak. Kedekatan hubungan Jerman Irak juga terefleksi dalam kerjasama *joint committee* Jerman-Irak yang tidak hanya mencakup hubungan ekonomi politik saja, melainkan juga hubungan budaya dan edukasi. Jerman dan Irak bekerja sama erat di sektor budaya dan pendidikan. Setiap tahun, sekitar 500 siswa, lulusan, dan peneliti Irak datang ke Jerman dengan bantuan dari German Academic Exchange Service (DAAD).

Dengan demikian, bantuan militer yang diberikan Jerman pada Peshmegera tahun 2014, menjadi salah satu alat perekat hubungan antara Jerman dan Irak. Kedekatan hubungan tersebut tercermin pada berbagai bidang, termasuk di dalamnya politik ekonomi dan budaya. Peningkatan hubungan ini juga ditandai dibentuknya *joint commission* Jerman-Irak. Selain itu, Pada tahun 2014-2015, didapati banyaknya kunjungan level tinggi (*High level visit*). Misalnya Menteri Luar Negeri Federal (Federal Foreign Minister) Steinmeier tengah berada di Baghdad dan Erbil untuk membicarakan tentang politik pada Agustus 2014 dan Desember 2015. Selama kunjungannya, beliau bertemu dengan Presiden Ma'soum, Perdana Menteri Al-Abadi dan Presiden KRG, Masoud Barzani dan lain-lain (Berlin Global, tt). Keberhasilan Jerman dalam mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Irak melalui berbagai kerjasama berbagai bidang menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi yang Jerman lakukan sangat tepat. Pemerintah Irak mempercayai Jerman dengan menerima bantuan-bantuan yang ditawarkan.

Kesimpulan :

Pengiriman bantuan militer yang berupa pelatihan militer dan persenjataan oleh Jerman kepada para pejuang Kurdi Peshmegera di Irak tahun 2014 merupakan upaya Jerman untuk meningkatkan keberhasilan strategis dalam perang melawan ISIS di Irak. Tindakan ini dilakukan Jerman atas dasar pertimbangan tercapainya keberhasilan strategis bagi Jerman. Keberhasilan strategis ini diterjemahkan menjadi keberhasilan ditinjau dari sisi tercapainya tujuan militer, tercapainya politik, ekonomi serta diplomasi.

Dari sisi tercapainya tujuan politik, tindakan yang dilakukan Jerman dalam perang melawan ISIS di Irak tahun 2014, sesuai dengan *national role* yang di anut oleh Jerman. *National role* Jerman ini adalah sikap Jerman dalam merespon apa yang terjadi pada lingkungan eksternal. Tindakan Jerman dengan mengirimkan bantuan militer ini selaras dengan tujuan Jerman yang tercantum pada *White Paper* Jerman yaitu mempertahankan sistem tatanan global yang ada saat ini, dengan membantu mempertahankan tata kelola global dan mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam hal keamanan global.

Dari sisi tercapainya tujuan militer, kemenangan perang ditentukan oleh kehancuran lawan dan berkaitan juga dengan penaklukan teritori, pandangan ini sesuai dengan pencapaian yang diperoleh oleh pasukan Kurdi Peshmegera dalam konfrontasi melawan militan ISIS di Irak. Atas beberapa keberhasilan yang di capai oleh pasukan Kurdi dan pasukan Irak, ISIS yang

pada awalnya mendominasi dan menguasai sekitar 40% wilayah di Irak, kemudian mulai dapat diatasi hingga hanya tersisa sekitar 7% total wilayah di Irak yang dikuasai oleh ISIS. Kemenangan-kemenangan yang telah diperoleh pasukan Kurdi Peshmerga dengan merebut kembali beberapa wilayah di Irak dan menumpas militan ISIS yang menaungi wilayah-wilayah tersebut merupakan suatu wujud keberhasilan dalam peperangan. Keberhasilan strategis yang dicapai oleh Jerman juga terkait bidang ekonomi dan diplomasi. Keberhasilan Jerman dalam mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Irak melalui berbagai kerjasama berbagai bidang menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi yang Jerman lakukan sangat tepat. Pemerintah Irak mempercayai Jerman dengan menerima bantuan-bantuan yang ditawarkan. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kebijakan Jerman memberikan bantuan militer kepada Peshmerga Irak 2014 memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jerman, terutama bagi industri perlengkapan senjata.

Referensi :

Buku dan Jurnal

- Gat, Azar. 1989. *The Origins of Military Thought from the Enlightenment to Clausewitz* 115. Virginia Law Review. Pp. 1751. Vol.95: 1745
- Holsti, K.J. 1970. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Blackwell Publishing : International Studies Quarterly, Vol. 14, No. 3, pp. 233.
- Jones, Seth G, Arturo Munoz. Tt. *Afghanistan's Local War : Building Local Defense Forces*. RAND publisher
- Kekes, Jhon. 2010. *War*. Philosophy, Vol. 85, No. 332, pp. 201. Published by: Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy.
- Miko T. Francis & Froehlich Cristian. 2004. Germany's Role in Fighting Terrorism: Implications for U.S Policy. CRS Report for Congress.
- O'Connor, Raymond G. 1969. *Victory in Modern War : Journal of Peace Research, Vol.6, No.4, Special Issue on Peace Research in History*. Sage Publications L.td, pp. 367-384.
- Ostovar, Afshon. 2015. "Deterrence and the Future of U.S.-GCC Defense Cooperation: A Strategic Dialogue Event." CAN Analysis and Solutions Report, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA, July 2015, p. 11.
- Sands, Timothy. 2016. Strategies for Combating Islamic State. Article, Department of Mechanical Engineering, Stanford University, 496 Lomita Mall, Stanford, CA 94305, USA. Edited by Martin J. Bull, Published 2 August 2016.
- Von Neubeck. 2007. dalam Slavica Mijatovic (2010). Peacekeeping missions of the Federal Republic of Germany – A state in search of new traditions and the challenges on that path. Western Balkans Security Observer. Germany, no. 16 January-March 2010.

Artikel Online

- Berlin Global. Tt. *The Embassy of Iraq in Berlin*. [online] dapat dilihat di <http://www.berlinglobal.org/index.php?the-embassy-of-iraq-in-berlin> [diakses pada 17 Oktober 2016]

- CNN. 2014. Who's Doing What in The Coalition Battle Against ISIS. [online] dapat di akses di <http://edition.cnn.com/2014/10/09/world/meast/isis-coalition-nations/> (diakses pada 15 Oktober 2016)
- Cooper, Helena. 2014. *Obama Enlists 9 Allies to Help in the Battle Against ISIS*. [online] dapat di akses di <https://www.nytimes.com/2014/09/06/world/middleeast/us-and-allies-form-coalition-against-isis.html> (diakses pada 15 Oktober 2016)
- Coren, Anna, Jomana Karadsheh and Faith Karimi. 2014. "U.S. warplanes, Kurdish forces pound ISIS targets in bid to retake Iraqi dam." [Online] Dapat dilihat di <http://edition.cnn.com/2014/08/17/world/meast/iraq-crisis/index.html> [diakses pada 30 Juni 2017]
- Federal Foreign Office. 2017. *Foreign & European Policy: Iraq*. [online] dapat dilihat di http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Irak_node.html [diakses pada 17 April 2017]
- Federal Ministry of Defence. 2006. *White Paper 2006 on German Security and the Future of the Bundeswehr*. [Online] dapat diakses di http://www.london.diplo.de/contentblob/1549496/Daten/78114/German_security_defence_summary.pdf [diakses pada 17 Oktober 2016]
- Gotkowska. 2014. *New Market Conditions and Exit Strategies German Arms Industry*. [online] dapat dilihat di <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2014-03-12/new-market-conditions-and-exit-strategies-german-arms-industry> [diakses pada 17 Oktober 2016]
- Jeffrey, James F. 2014. *Actually, Our Military Keeps Winning*. [online] dapat di akses di <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/actually-our-military-keeps-winning> (diakses pada 15 Oktober 2016)
- Kompas. 2017. *ISIS Tinggal Kuasa 7 Persen Wilayah yang Pernah Direbutnya di Irak*. [online] dapat di akses di <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/12/07150041/isis.tinggal.kuasai.7.persen.wilayah.yang.pernah.direbutnya.di.irak> (diakses pada 15 Oktober 2016)
- Pöhle, Sven. 2014. Germany to send training mission to Iraqi Kurds. [online] dapat di akses di <http://www.dw.com/en/germany-to-send-training-mission-to-iraqi-kurds/a-18124273> (diakses pada 1 Januari 2017)
- Sidney, Garrison. 2016. *Halting ISIS : Kurdish Military Resistance Againsts The Islamic State*. [Online] Dapat dilihat di <https://sfsu-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.3/187165/AS362016POLIH36.pdf?sequence=1> [diakses pada 1 Juni 2017]
- Spiegel. tt. Several Radicalized Ex-German Soldiers in Iraq. [Online] dapat dilihat di <http://www.spiegel.de/international/world/german-weapons-for-kurds-may-be-used-on-radicalized-german-soldiers-a-989194.html>. [diakses pada 19 juni 2017]
- Transnational Terrorism Security & the Rule of Law. 2008. Case Study: Germany. WP 6, Deliverable 12b. [online] dapat diakses di www.transnationalterrorism.eu (diakses pada 15 Oktober 2016)

Wallace, Stephan. 2014. *German Military Aid to the Kurdish Peshmerga*. [online] dapat di akses di <http://www.aicgs.org/issue/german-military-aid-to-the-kurdish-peshmerga/> (diakses pada 15 Oktober 2016)